BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 188.342/Kep.457-Huk/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR: 188.342/Kep.518-HUK/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 188.342/Kep.518-Huk/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 188.342/Kep.518-Huk/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Pemrakarsa		
H. Dicky Darmawan, SH.,M.Hum., CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum Setda, CGRE	
Paraf koordinasi		
H. Dicky Darmawan, SH.,M.Hum., CGRE	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra	
Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Oktober 2026

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 188.342/Kep.457-Huk/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR: 188.342/KEP.518-HUK/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

DAFTAR NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

NO	NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI	KETERANGAN
1	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 113 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	BKAD
2	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH	DINAS PENDIDIKAN
3	PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP
4	BESARAN HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH	KESBANGPOL
5	BESARAN HONORARIUM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2026	KESBANGPOL
6	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN STIMULUS DAN MINIMAL PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)	BAPENDA
7	BESARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH	RSUD BAYU ASIH
8	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BAPENDA
9	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWAKARTA	BAGIAN ORGANISASI
10	PERUBAHAAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 150 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN KENDARAAN BUS DAN TRUK TERTENTU MEMASUKI BEBERAPA RUAS JALAN PERKOTAAN	DINAS PERHUBUNGAN
11	SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN PURWAKARTA	DISKOMINFO

12	PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH	DISKOMINFO
13	PEDOMAN PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN PURWAKARTA	DISKOMINFO
14	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PORTAL PURWAKARTA SATU DATA TERINTEGRASI	DISKOMINFO
15	SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PURWAKARTA	DISKOMINFO
16	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO 150 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN ANGKUTAN BUS DAN TRUK TERTENTU	DISHUB
17	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN TUNJANGAN TETAP BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH	RSUD BAYU ASIH
18	BESARAN HONORARIUM TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG	DPUTR
19	BESARAN HONORARIUM TENAGA BANTUAN TEKNIS LAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	DPUTR
20	TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026	DPMD
21	KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025-2029	BPBD
22	RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025-2029	BPBD
23	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029	BAPPERIDA
24	STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2027	BKAD
25	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR TEKNIS	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
26	PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH	DISPANGTAN
27	STRATEGI PEMBERDAYAAN PETANI MILENIAL	DISPANGTAN
28	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA	RSUD BAYU ASIH
29	PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR CAKUPAN LAYANAN JKN NON SKEMA GANDA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2027	DINAS KESEHATAN
30	KEWASPADAAN PENYAKIT MENULAR, PENYAKIT TIDAK MENULAR, DAN PENYELENGGARAAN IMUNISASI DI	DINAS KESEHATAN
31	RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH TAHUN 2025-2029	BAPPERIDA
32	SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH	BAPPERIDA

	KABUPATEN PURWAKARTA	
33	PENGELOLAAN INVESTASI, KERJASAMA, DAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA	RSUD BAYU ASIH
34	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2027	BAPPERIDA
35	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK PURWAKARTA (PERSERODA)	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA
36	PENYELENGGARAAN SATU DATA PENDAPATAN DAERAH DALAM SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA	BAPENDA
37	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 177 TAHUN 2018 TENTANG PENGISIAN ANGGOTA BADAN PEMUSYAWARATAN DESA	DPMD
38	PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH	RSUD BAYU ASIH
39	PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029	DPPKB
40	PEDOMAN PENGESAHAN MASTER PLAN, SITE DAN INFORMASI TATA RUANG	DPUTR
41	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
42	PEDOMAN PENGUSULAN DAN PENETAPAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	BKPSDM
43	DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA	BKPSDM
44	MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	BKPSDM
45	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA *(UNIVERSAL HEALTH COVERAGE)* DI KAB. PURWAKARTA	DINAS KESEHATAN
46	PEDOMAN PELAKSANAAN SINERGISITAS JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	DINAS KESEHATAN
47	WAJIB BELAJAR 1 (SATU) TAHUN PRASEKOLAH	DINAS PENDIDIKAN
48	PEDOMAN EVALUASI MANAJEMEN RESIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	INSPEKTORAT
49	LAYANAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*	BADAN PENDAPATAN DAERAH
50	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA BADAN	BPBD

	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
51	BADAN USAHA MILIK DESA	DPMD
52	PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
53	PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA	BAGIAN ORGANISASI SETDA
54	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 113 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
55	SINERGI PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KEPATUHAN PENGGUNAAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA DALAM PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Paraf Pemrakarsa		
H. Dicky Darmawan, SH.,M.Hum., CGRE	Kepala Bagian Hukum Setda	
Paraf koordinasi		
H. Dicky Darmawan, SH.,M.Hum., CGRE	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra	
Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN